

Media Cetak	Tribun Timur
Tanggal	Selasa, 18 Maret 2025
Wilayah	Kabupaten Enrekang



Uang THR Pemkab Enrekang Terkumpul di Bulan Juni

Uang THR Pemkab Enrekang Terkumpul di Bulan Juni

ENREKANG, TRIBUN

- Bupati Enrekang, Yusuf Ritangnga janji membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) pegawai tepat waktu.

Hal itu ia sampaikan melalui, Kepala BKAD Enrekang, Permadi Hasan saat menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Enrekang.

"Tetapi sebenarnya secara normal nanti di bulan Juni baru bisa terkumpul untuk bayar THR. Tetapi ini mudah-mudahan bisa karena Bupati dan Wakil Bupati sudah menyurat kemana mana," jelas Permadi, pekan lalu.

Berdasarkan keterangan salah seorang pegawai di Pemkab Enrekang, hingga kemarin, THR belum masuk ke rekening mereka.

"Ini masih belum ada

masuk. Biasanya ada notifikasinya kalau sudah ada. Tapi ini belum ada saya cek," tutur Ummi memperlihatkan saldo rekeningnya Senin (17/3) malam.

Ia juga menuturkan, jika seharusnya hari ini, THR tersebut sudah cair sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

"Iya karena, presiden bilang kalau akan di bayar tepat waktu, tapi ini belum ada cair sepeserpun," tuturnya.

Ia menyampaikan agar pihak Pemkab Enrekang dapat segera membayar-

kan THR tersebut.

"Harus segera dibayar, karena banyak kebutuhan ini, apalagi mau lebaran," tuturnya.

"Tetapi sebenarnya secara normal nanti di bulan Juni baru bisa terkumpul untuk bayar THR. Tetapi ini mudah-mudahan bisa karena Bupati dan Wakil Bupati sudah menyurat kemana mana."

PERMADI HASAN
Kepala BKAD Enrekang

Kebijakan pembayaran THR ASN, serta PPPK ini disampaikan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya, Prabowo mengatakan ada total sebanyak 9,4 juta penerima THR ini.

Ia pun membeberkan

besaran THR dan gaji ke-13 yang akan didapatkan aparatur negara.

Menurut Presiden, THR dan gaji ke-13 diberikan kepada seluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah.

Prabowo menjelaskan besaran THR dan gaji ke-13 yang diberikan meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sebesar 100 persen bagi ASN pusat, prajurit TNI-Polri, dan para hakim.

Sedangkan bagi ASN daerah, diberikan dengan skema yang sama seperti ASN pusat, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.

"Bagi pensiunan, diberikan sebesar uang pensiun bulanan," ungkap Prabowo di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (11/3). (qad)